

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada kabupaten dan kota memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri keuangan serta anggaran daerah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan pada (UU No. 22/1999) tentang “Pemerintahan Daerah”, (UU No. 25/1999) tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”, kemudian mengalami revisi menjadi (UU No. 32/2004) tentang “Pemerintahan Daerah”, lalu direvisi menjadi (UU No. 23/2014) tentang “Pemerintahan Daerah”, dan terakhir (UU No. 9/2015) tentang “Perubahan Kedua Atas (UU No. 23/2014) Tentang Pemerintahan Daerah” yang menegaskan bahwa pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk melaporkan sisa masa jabatan.

Salah satu wujud pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Berdasarkan informasi yang tertera dalam laporan keuangan masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah. [CITATION Nan13 \l 1033] menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan

lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri untuk menunjang APBD yang lebih baik adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan. Mengingat adanya tuntutan dari masyarakat atas laporan pertanggungjawaban yang transparan, dan akuntabilitas laporan keuangan pada lembaga pemerintahan daerah dianggap masih memiliki banyak keterbatasan penyajian yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga yang bersifat komersial. Laporan keuangan yang disajikan dan disusun oleh pusat maupun masing-masing pemerintah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

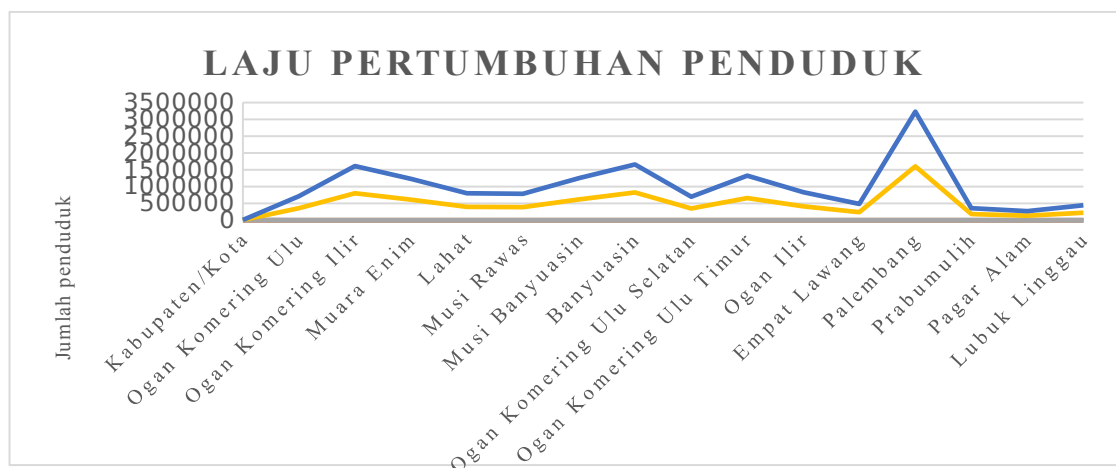
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya.

Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan yang tepat serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik. Dalam pengukuran kinerja pemerintah menurut [CITATION Mar181 \t \l 1033]

diperlukan indikator atau tolok ukur yang dapat dinyatakan secara jelas.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Kesenjangan, dan Rasio Pertumbuhan (Halim, 2012).

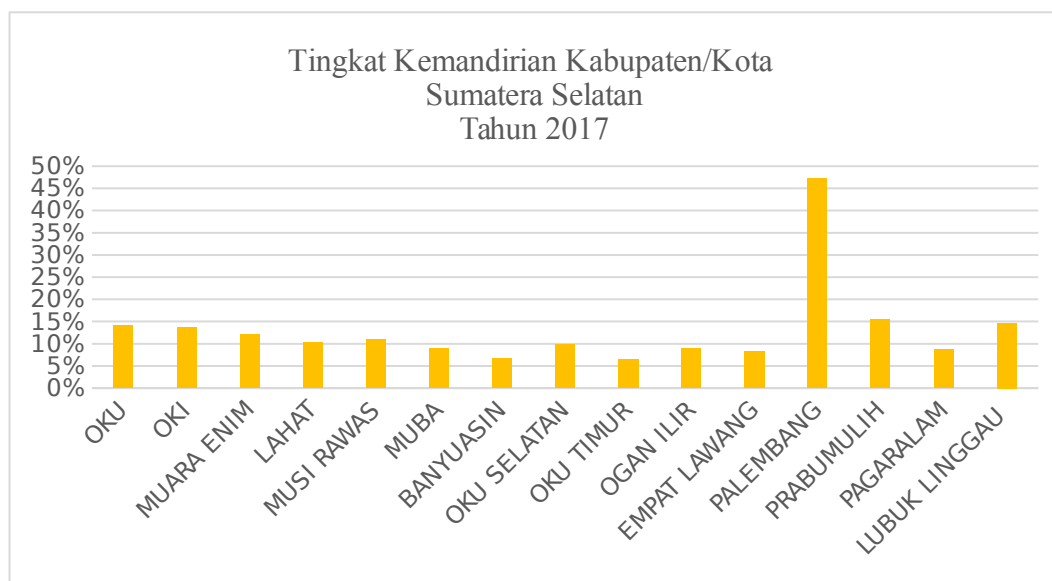
Population yang merupakan faktor lingkungan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu daerah maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, dengan adanya tuntutan tersebut maka pemerintah akan terdorong untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Darmanto, 2012:21). Namun, pada penelitian Patriati(2010:82) menunjukkan hasil *population* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Jawa Tengah. *Population* akan menjadi semakin menarik untuk dilihat pengaruhnya pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan yang jumlah penduduknya setiap tahun selalu meningkat. Peningkatan pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan seperti terlihat pada gambar 1.1



Sumber: Diolah, BPS Provinsi Sumsel 2019

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Penduduk

Penelitian ini mengacu pada penelitian Darmanto (2012) dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama peneliti mengambil ruang lingkup provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan kedua peneliti mengukur kinerja keuangannya melalui tingkat kemandirian. Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dan dianalisis melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Setiap daerah akan berupaya untuk selalu menyajikan laporan keuangan sebaik-baiknya melalui rasio kemandirian dapat dilihat seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri, dapat dilihat pada gambar 1.2



Sumber: Diolah, BPS Provinsi Sumsel 2019

Gambar 1.2
Tingkat Kemandirian Daerah

Peneliti menganalisis kinerja keuangan melalui pendekatan tingkat kemandirian pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan informasi yang tertera pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 dan hasilnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih belum menunjukkan kinerja keuangan yang optimal terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Terlihat tingkat kemandirian tertinggi hanya mencapai 47% yang dimiliki oleh Kota Palembang. Sedangkan tingkat kemandirian terendah adalah 6% yang dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih menunjukkan kinerja yang rendah. Hasil analisis tingkat

kemandirian tahun 2017 provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pada kabupaten dan kota di Sumatera Selatan masih belum merata dan masih tergolong rendah untuk tingkat kemandirian daerah.

Karakteristik kedua adalah ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan total aset. Besarnya Total aset pemerintah daerah dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan masing-masing pemerintah daerah hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan atas laporan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah yang kecil ukurannya. Pengelolaan aset ini masih menjadi masalah dalam suatu pemerintah daerah,

Faktor Karakteristik ketiga adalah tingkat kemakmuran yang diukur dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibandingkan dengan total Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah dan kenaikan kontribusi sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut [CITATION Sum101 \l 1033]. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan.

Karakteristik keempat yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah intergovernmental revenue yang diukur dengan dana perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan *operating revenues to total revenues* (tingkat kemandirian), dengan mengambil sampel laporan keuangan dan data dari badan pusat statistik pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatanyang menggunakan empat variabel independen: *Population*, Ukuran Daerah(*size*), Tingkat Kemakmuran(*wealth*) dan Intergovernmental Revenue yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Karakteristik Pemerintahan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *Population*, Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah , Tingkat kemakmuran (*wealth*) dan *Intergovernmental revenue* memiliki pengaruh secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah *Population*, Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah , Tingkat kemakmuran (*wealth*) dan *Intergovernmental revenue* memiliki pengaruh secara Simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan dikarenakan Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir baru berdiri di tahun 2013 Sehingga tidak dijadikan sampel penelitian. Data yang digunakan adalah data laporan hasil pemeriksaan atas Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) *audited* yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun anggaran 2013-2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *Population*, Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah , Tingkat kemakmuran (*wealth*) dan *Intergovernmental revenue* berpengaruh secara Parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *Population*, Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah, Tingkat kemakmuran (*wealth*) dan *Intergovernmental revenue* berpengaruh secara Simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi mengenai pengaruh karakteristik pemerintahan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam peningkatan kemampuan menganalisis masalah dan membuat suatu karya tulis di bidang ilmiah.
3. Untuk memberikan pengetahuan bagi ilmu akuntansi yang diperlukan untuk membantu membuat kurikulum dalam sistem pendidikan akuntansi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang professional.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna membuat laporan ini lebih terarah , maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi dasar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam melakukan analisis dan pembahasan masalah yang ada yaitu mengenai karakteristik pemerintah daerah, Laporan keuangan pemerintah daerah, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian , populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan isi pembahasan serta analisa terhadap data-data yang diperoleh dari pengujian terhadap hipotesis dan membandingkannya dengan teori pada BAB II mengenai pengaruh karakteristik pemerintahan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang meliputi apakah *Population*, Ukuran (*size*) pemerintah daerah, Tingkat kemakmuran (*wealth*), dan *Intergovernmental revenue* berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah .

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan memberikan suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya. selain itu penulis juga memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah berupa kesimpulan dan saran.